

Hegemoni Barat dalam Kebijakan Pemuda ASEAN: Analisis Wacana Kritis atas Paradigma Generasional dalam AMMY (1992–2024) dan AMMY+3 (2007–2023)

Mahatma Aditya Mikaila

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

mahatmamikaila7@gmail.com

Submitted: 28 October 2025; Revised: 9 February 2026; Accepted: 27 February 2026

ABSTRACT

This study critically examines how ASEAN’s policies on youth issues reproduce development narratives rooted in Western hegemonic ideologies. The novelty of this research lies in its focus on the ideological construction of youth within ASEAN’s policy discourse, differing from previous studies that primarily view youth as neutral subjects of development. Employing (Fairclough’s 2023) Critical Discourse Analysis and (Escobar’s 1995) decolonization framework, the study analyzes policy texts from the ASEAN Ministerial Meeting on Youth (AMMY) and ASEAN Ministerial Meeting on Youth +3 (AMMY+3) to uncover the underlying power structures and meanings embedded in ASEAN’s development agenda. The findings reveal that youth within ASEAN discourse are constructed through the “Instrumentalization of Youth,” where they are positioned primarily as objects and beneficiaries of development rather than as autonomous actors or decision-makers. The narratives emphasize youth as economic and social assets who contribute to regional stability and productivity, while concerns related to equity, participation, and social justice remain marginalized. The results demonstrate ASEAN’s continued adherence to Western development paradigms prioritizing economic growth, employability, and resilience, often overlooking local contexts, cultural diversity, and political constraints. The study concludes by arguing for a transformative, inclusive, and justice-oriented policy framework recognizing young people as rights-bearing individuals capable of shaping ASEAN’s social and political future.

KEYWORDS ASEAN | Youth | Policy | Western Hegemony

PENDAHULUAN

Asia Tenggara, dengan populasi mencapai 685,4 juta jiwa pada tahun 2024 (Statesman 2025), merupakan salah satu kawasan dengan populasi muda terbesar di dunia. Pada tahun 2020, jumlah penduduk muda di kawasan ini mencapai 224,2 juta jiwa, di mana Generasi Z mencakup 53% dari total populasi (ASEAN Sekretariat 2023). Meskipun memiliki jumlah pemuda yang sangat besar,

akses terhadap pendidikan masih menjadi persoalan serius. Pada tahun 2024, tercatat sekitar 11,8 juta anak muda tidak bersekolah, yang tidak hanya menghambat pembangunan sumber daya manusia di kawasan ini, tetapi juga meningkatkan risiko eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan manusia (SEAMEO Sekretariat 2025). Jumlah kasus perdagangan manusia bahkan meningkat 4,7 kali lipat, dari

296 kasus pada tahun 2022 menjadi 978 kasus pada tahun 2023, dengan mayoritas korban berusia antara 18 hingga 35 tahun (International Organisation for Migration 2024). Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun pemuda sering dianggap sebagai aset demografis, mereka juga rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan institusional.

Association of Southeast Asian Nations atau dikenal sebagai ASEAN merupakan organisasi kawasan yang menaungi negara-negara di Asia Tenggara, organisasi regional ini tidak luput dari pengaruh hegemoni Barat. Terlihat dari berbagai rencana pembangunan yang meniru pola organisasi dan pemerintahan Barat. ASEAN didirikan pada 8 Agustus 1967 sebagai organisasi regional di Asia Tenggara yang berfungsi untuk memperkuat kerja sama di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan, serta memelihara stabilitas dan perdamaian kawasan dengan berlandaskan keadilan, supremasi hukum, dan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (ASEANa 1996).

ASEAN memiliki agenda yang luas terkait kepemudaan, antara lain *ASEAN Youth Dialogue*, *ASEAN Plus Youth Summit*, *ASEAN Youth Organization*, *AMMY*, dan *AMMY Plus Three*. Namun, studi ini berfokus pada AMMY dan *AMMY Plus Three*. Pertemuan Menteri ASEAN tentang Kepemudaan (AMMY) merupakan inisiatif kerjasama kepemudaan yang dibentuk pada tahun 1992 di Jakarta oleh para menteri negara anggota ASEAN (ASEANa 1992). Pada tahun 2007, AMMY memperluas mekanisme kerja samanya dengan tiga negara mitra, yaitu Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, dan Republik Korea, melalui *AMMY Plus Three* yang menjadi wadah utama bagi negara-negara anggota untuk mengembangkan kebijakan kepemudaan di tingkat menteri. Seiring berjalannya waktu, ASEAN berupaya membangun identitas kawasan melalui agenda AMMY dan *AMMY Plus Three* dengan memanfaatkan isu kepemudaan sebagai

sarana untuk menegaskan posisinya terhadap pengaruh Barat. Sejalan dengan pandangan (Wojczewski 2018), pergeseran kekuatan global dan munculnya tatanan pasca-Barat terjadi karena adanya perebutan hegemoni atas makna identitas.

Studi ini menganalisis dokumen menteri ASEAN tentang isu kepemudaan dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis (Fairclough 2023) dan paradigma (Arturo Escobar 1995) untuk mengkaji bagaimana dokumen-dokumen pertemuan tingkat menteri ASEAN mengenai pemuda dibentuk. Dengan demikian, studi ini berlandaskan pada perspektif dekolonisasi dalam studi pembangunan yang menyoroti bagaimana wacana pembangunan mereproduksi dinamika kekuasaan global. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma hegemoni Gramsci, yang menekankan bahwa hegemoni ideologis terjadi melalui persetujuan dan kendali wacana, sehingga memungkinkan analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana kebijakan ASEAN membentuk konstruksi tentang pemuda.

Studi ini menunjukkan bahwa pemuda diposisikan sebagai objek pembangunan kawasan Asia Tenggara, sebuah konsep yang berakar pada hegemoni ideologi Barat. Negara-negara Barat telah mendominasi wacana pembangunan global, salah satunya melalui penggunaan lembaga swadaya masyarakat untuk memperluas pengaruh mereka di negara-negara berkembang (Wright 2012). Dalam konteks pendidikan, berfungsi sebagai instrumen hegemoni, *soft power* (Lo 2011; Wright 2012; Bittencourt dan Willetts 2018). Pola serupa ditemukan oleh (Ashcraft 2000; Roth dan Brooks 2003; 2016) dimana pendidikan berperan dalam membentuk kompetensi yang memperkuat kerangka pembangunan yang dipimpin oleh Barat. Hegemoni ini membuat negara-negara non-Barat bergantung pada paradigma yang dibentuk oleh lembaga internasional, yang pada dasarnya berakar pada nilai dan kepentingan Barat, sehingga

menempatkan negara serta institusi non-Barat di bawah kendali mereka.

Meskipun ASEAN menunjukkan sikap resistensi terhadap hegemoni Barat (Stubbs, 2008), sejalan dengan temuan (Malherbe dkk. 2016; Coleman dan Serpell 2008; Nordtveit 2010; Komlosy 2016; Buier 2022) tetapi arah kebijakan kawasan ini masih banyak dipengaruhi oleh paradigma pembangunan Barat. Melalui kebijakan kepemudaan AMMY dan AMMY *Plus Three*, pemuda kerap diposisikan sebagai agen pembangunan yang disiapkan untuk memenuhi tuntutan ekonomi global, memperkuat kerja sama regional dan internasional, serta mendukung pembangunan identitas kawasan melalui penyelarasan dengan standar global. Orientasi tersebut secara tidak langsung mengalihkan perhatian dari kompleksitas realitas sosial, kultural, dan struktural yang khas di Asia Tenggara. Dalam konteks ini, ASEAN menempatkan pemuda sebagai instrumen pencapaian tujuan regional, yang selaras dengan narasi pembangunan global yang juga dipromosikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (Walker 1981; Bersaglio dkk. 2015; Ballard dkk. 2023; Wang 2023; Boat dkk. 2024; Samad 2020).

Studi ini kemudian berargumen bahwa kaum muda dipandang sebagai kelompok demografis yang diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan global yang dirumuskan oleh pembuat kebijakan lintas generasi (Woodman & Wyn 2013a). Dalam agenda kepemudaan ASEAN, penguatan identitas ASEAN dipromosikan sebagai sarana untuk mendorong kontribusi generasi muda terhadap integrasi regional sekaligus menempatkan mereka sebagai sasaran utama pembangunan. Namun, orientasi kebijakan tersebut berpotensi menciptakan jarak antara kaum muda dan akar kebudayaan lokal mereka (Coleman dan Serpell 2008; Ungar dkk. 2008). Selain itu, dominasi pendekatan yang menitikberatkan pada penguatan kapasitas individu cenderung mengabaikan faktor-

faktor struktural yang membentuk pengalaman hidup pemuda di Asia Tenggara, sehingga isu kesejahteraan dan keadilan sosial pemuda sering kali terpinggirkan dalam agenda resmi ASEAN.

Berangkat dari permasalahan tersebut, tujuan studi ini adalah menelusuri bagaimana kebijakan ASEAN tentang isu kepemudaan merepresentasikan wacana pembangunan yang masih dipengaruhi oleh hegemoni Barat. Dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis (Fairclough 2023), studi ini tidak hanya menelaah bagaimana para menteri ASEAN membicarakan pemuda, tetapi juga bagaimana pilihan diksi, narasi, dan kerangka kebijakan tersebut merefleksikan relasi kuasa antara ASEAN dan paradigma pembangunan Barat. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan utama: “Bagaimana para menteri ASEAN merepresentasikan pemuda dalam agenda kepemudaan dan bagaimana representasi tersebut mereproduksi atau menegosiasikan relasi hegemonik antara ASEAN terhadap wacana pembangunan?” Pertanyaan ini berangkat dari asumsi bahwa, sebagaimana ditegaskan dalam analisis wacana kritis, bahasa kebijakan bukanlah ruang yang netral, melainkan arena yang sarat kepentingan, ideologi, dan praktik kekuasaan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menggali lebih dalam dinamika produksi, reproduksi, dan legitimasi wacana kebijakan pemuda ASEAN, sekaligus mengidentifikasi kemungkinan ruang resistensi dan negosiasi terhadap dominasi paradigma global.

KAJIAN LITERATUR

Menurut Analisis Wacana Kritis Fairclough, hegemoni bekerja melalui teks, praktik wacana, dan praktik sosial yang memperlihatkan bagaimana kekuasaan serta ideologi membentuk bahasa dan institusi. Sejumlah studi terdahulu menunjukkan bahwa hegemoni Barat dalam pembangunan

mendominasi bidang pendidikan, kebijakan, dan tata kelola, dengan mendorong modernisasi sekaligus menyingkirkan pandangan lokal. Di sisi lain, beberapa penelitian berpendapat bahwa upaya tandingan terhadap hegemoni telah muncul untuk menentang narasi tersebut, namun kebijakan pemuda ASEAN masih mencerminkan norma-norma Barat. Berdasarkan dokumen dari pertemuan menteri-menteri ASEAN tentang Pemuda menunjukkan bahwa pemuda diposisikan berdasarkan standar global, dengan penekanan pada produktivitas dan kemampuan kerja dibandingkan keterlibatan kewargaan yang berakar pada konstruksi "*normative adulthood*" (Woodman dan Wyn 2013b). Akibatnya, partisipasi pemuda cenderung bersifat simbolis dan memperkuat pendekatan top down yang memandang pemuda sebagai objek pembangunan, bukan sebagai agen perubahan.

Bentuk pemeliharaan hegemoni barat

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa hegemoni Barat dipertahankan melalui berbagai konteks. (Walker 1981) menyoroti wacana hegemonik dalam skema klasifikasi global, sementara (Wright 2012) menekankan peran organisasi non-pemerintah dalam memperkuat dominasi tersebut sekaligus menawarkan alternatif solusinya. Dalam bidang pendidikan, (Harper 2011) menunjukkan dominasi pendidikan berbahasa Inggris yang membatasi keberagaman bahasa global, sedangkan (Lo 2011) mengungkap dominasi model pendidikan tinggi Barat melalui mekanisme peringkat universitas sebagai bentuk kekuatan lunak. (Bittencourt dan Willetts 2018) juga menegaskan bahwa narasi internasionalisme dan multinasionalisme pasar turut menopang hegemoni neoliberalisme.

Bentuk perlawanan hegemoni barat

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perlawanan terhadap hegemoni Barat

muncul di berbagai bidang. (Coleman dan Serpell 2008) mengkritik pendekatan normatif dalam psikologi perkembangan barat serta mendorong kurikulum yang lebih inklusif. (Stubbs 2008) melihat perlawanan ASEAN terhadap hegemoni Barat melalui prinsip kemandirian, non-intervensi, dan diplomasi damai yang juga sejalan dengan Tiongkok. (Nordtveit 2010) menyoroti upaya menentang dominasi hegemoni kapitalisme dalam globalisasi yang melahirkan keseragaman wacana. (Komlosy 2016) menunjukkan melemahnya hegemoni Amerika Serikat seiring bangkitnya kekuatan Global Selatan, terutama Tiongkok. (Malherbe dkk. 2016) menampilkan resistensi pemuda Etiopia melalui ekspresi visual untuk menentang hegemoni Barat, sementara (Wojczewski 2018) membahas pergeseran hegemoni kekuatan global melalui gagasan Hubungan Internasional Pasca-Barat. Lebih jauh, (Buier 2022) juga menyoroti proyek transportasi AVE sebagai contoh dominasi tanpa hegemoni sekaligus memicu resistensi lokal di wilayah Basque.

Hegemoni barat dalam kebijakan pemuda ASEAN

Hegemoni Barat tersirat dalam berbagai teks kebijakan pembangunan pemuda ASEAN, terutama dalam cara pemuda dirumuskan dan diarahkan. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pengaruh Barat membentuk retorika dan orientasi kebijakan pembangunan pemuda. Dalam bidang pendidikan, (Ashcraft 2000) menunjukkan peran pendidikan tinggi dalam pengembangan pemuda berbasis kompetensi dan pengalaman, sementara (Roth dan Brooks 2003; 2016) menegaskan bahwa program pendidikan dan pengembangan pemuda cenderung diarahkan pada standar global. Namun, pendekatan ini juga menuai kritik karena dianggap normatif dan kurang peka terhadap konteks budaya lokal, khususnya dalam kajian psikologi perkembangan dan ketahanan pemuda (Ungar dkk. 2008; Coleman

dan Serpell 2008). Dalam konteks global, (Bersaglio dkk. 2015) menunjukkan bahwa wacana PBB kerap memosisikan pemuda secara instrumental sebagai aset, risiko, atau warga negara ideal yang sedang dibentuk. Sejumlah studi mutakhir juga menegaskan bahwa inisiatif pembangunan pemuda masih dominan menempatkan mereka sebagai objek kebijakan (Ballard dkk. 2023; Wang dkk. 2023; Boat dkk. 2024). Pada level nasional, (Wound 2020) menunjukkan penggunaan kekuatan lunak Jepang melalui budaya populer untuk mempengaruhi pemuda ASEAN, sementara (Sutopo 2022a) menegaskan bahwa di Indonesia wacana kewirausahaan digunakan negara dan industri sebagai janji kesuksesan masa depan. Meski demikian, (Malherbe dkk. 2016) mengingatkan bahwa pemuda tidak semata menjadi objek, tetapi juga dapat tampil sebagai subjek perlawanan terhadap hegemoni Barat.

Sebagai kesimpulan, hegemoni Barat terus direplikasi melalui pendidikan, kebijakan, dan wacana internasional. Dalam konteks ASEAN, dominasi ini tampak pada kebijakan pembangunan pemuda yang menerima norma global secara instrumental, mengabaikan realitas lokal, dan memperkuat ketergantungan pada lembaga global. Studi ini memperkaya literatur dimana, pemuda direpresentasikan sebagai objek pembangunan, dengan partisipasi simbolis yang diarahkan oleh tujuan global.

METODE

Desain penelitian dan pengambilan data

Studi ini menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) yang dikembangkan oleh Norman Fairclough 2023. Pendekatan ini berfokus pada analisis struktur teks, praktik wacana, dan konteks sosial-politik untuk mengkaji bagaimana wacana kebijakan ASEAN membentuk pemuda sebagai sasaran pembangunan sekaligus merefleksikan kerangka ideologis regional yang lebih luas.

Melalui kerangka ini, penelitian menelusuri bagaimana identitas, partisipasi, dan peran pemuda diproduksi, dinegosiasikan, serta dilembagakan dari waktu ke waktu.

Data utama penelitian berasal dari dokumen resmi hasil *ASEAN Ministerial Meeting on Youth* dan *ASEAN Ministerial Meeting on Youth +3*. Pemilihan dokumen tersebut sebagai korpus penelitian didasarkan pada otoritas institusional dan kesinambungannya dalam membentuk arah kebijakan kepemudaan di tingkat regional. Sebagai forum tingkat menteri yang secara khusus membahas isu kepemudaan, AMMY dan AMMY+3 menghasilkan dokumen kebijakan yang konsisten dan normatif, sehingga menyediakan basis yang kuat untuk menganalisis perkembangan serta reproduksi narasi resmi ASEAN mengenai pemuda dalam kerangka pembangunan regional. Untuk memastikan relevansi dan ketepatan data, penelitian ini menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi. Adapun kriteria inklusi sebagai berikut:

1. Dokumen yang tersedia dalam bentuk publikasi resmi dan dapat diakses melalui situs resmi ASEAN.
2. Dokumen yang secara spesifik berfokus pada *ASEAN Ministerial Meeting on Youth* (AMMY) dan *ASEAN Ministerial Meeting on Youth +3* (AMMY+3).
3. Dokumen yang tersedia dalam bahasa Inggris untuk menjaga konsistensi analisis.

Adapun Kriteria Eksklusi sebagai berikut:

1. Dokumen berupa opini, artikel media, publikasi akademik sekunder, atau laporan organisasi non-ASEAN.
2. Dokumen yang tidak secara spesifik membahas *ASEAN Ministerial Meeting on Youth* (AMMY) dan *ASEAN Ministerial Meeting on Youth +3* (AMMY+3).
3. Dokumen yang tidak tersedia secara

publik atau tidak dapat diverifikasi keasliannya melalui sumber resmi.

Tabel 1. Kronologi Pertemuan *ASEAN Ministerial Meeting on Youth* (AMMY) dan AMMY+3 (1992–2024)

Agenda AMMY dan AMMY +3	Tahun
AMMY I	1992
AMMY II	1997
AMMY III	2000
AMMY IV	2003
AMMY +3 I	2007
AMMY VIII	2013
AMMY +3 IV	2013
AMMY +3 V	2015
AMMY X	2017
AMMY +3 VI	2017
AMMY XI	2019
AMMY +3 VII	2019
AMMY XII	2023
AMMY +3 VIII	2023
AMMY +3 IX	2024
AMMY XIII	2024
Total	16

(Sumber :Penulis)

Setelah melalui proses seleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi serta penilaian relevansi terhadap fokus studi, studi ini mengidentifikasi 16 dokumen yang memenuhi kriteria analisis. Dokumen tersebut terdiri atas 9 dokumen yang dihasilkan dari *ASEAN Ministerial Meeting on Youth* (AMMY) dan 7 dokumen dari *ASEAN Ministerial Meeting on Youth +3* (AMMY+3), yang kemudian dijadikan sebagai korpus data dalam analisis.

Pengumpulan data dan keterbatasan penelitian

Data dikumpulkan melalui penelusuran sistematis dokumen resmi *ASEAN Ministerial Meeting on Youth* dan *ASEAN Ministerial Meeting on Youth +3* yang tersedia untuk publik, kemudian ditabulasi menggunakan *Microsoft Excel* untuk membangun korpus data yang terorganisasi dan dapat dilacak. Proses tabulasi

bertujuan memastikan keterlacakan sumber, mempermudah seleksi dan peninjauan ulang dokumen, serta mendukung analisis wacana secara sistematis. Distribusi jumlah dokumen tiap pertemuan disajikan pada tabel berikut berdasarkan hasil penabulasian tersebut.

Ketersediaan dokumen resmi memengaruhi pemilihan rentang tahun studi ini. Akses yang terbatas terhadap sebagian dokumen kebijakan menjadi tantangan utama, sehingga studi ini bergantung pada arsip yang dapat diakses secara terbuka. Keterbatasan ini sekaligus mencerminkan persoalan transparansi institusional dalam distribusi dokumen kebijakan regional, yang secara metodologis memengaruhi kedalaman analisis terhadap konstruksi wacana kepemudaan.

Analisis data

Melalui kerangka Analisis Wacana Kritis Fairclough, penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap utama, dimana di antaranya adalah :

1. Analisis teks:

Mengkaji bagaimana Pemuda direpresentasikan dalam kebijakan *ASEAN Ministerial Meeting on Youth* (AMMY) dan *ASEAN Ministerial Meeting on Youth Plus Three* (AMMY +3) melalui pilihan diksi dan narasi.

2. Analisis praktik diskursif:

Menelaah bagaimana wacana pemuda diproduksi, disirkulasikan, dan dinormalisasi dalam kebijakan *ASEAN Ministerial Meeting on Youth* (AMMY) dan *ASEAN Ministerial Meeting on Youth Plus Three* (AMMY +3)

3. Analisis praktik sosial–budaya:

Mengaitkan wacana pemuda dengan konteks sosial, budaya, dan ideologis yang lebih luas dalam konteks pembangunan ASEAN. Paradigma Arturo Escobar digunakan untuk

memperkuat pemahaman mengenai bentuk marginalisasi tersebut. Paradigma pembangunan Escobar membantu menjelaskan bagaimana kebijakan pemuda ASEAN dibentuk dan direplikasi dalam wacana pembangunan regional. Dalam bukunya, Escobar menyatakan bahwa pembangunan merupakan konstruksi wacana yang mengubah realitas sosial di negara-negara berkembang. Ia menulis bahwa

“A type of development was promoted which conformed to the ideas and expectations of the affluent West, to what the Western countries judged to be a normal course of evolution and progress” (Escobar 1995: 26).

Dengan demikian, pembangunan menjadi sebuah rezim representasi yang memengaruhi cara negara-negara Selatan dipandang dan diubah sesuai dengan cita-cita Barat.

Tabel 2. Proses Analisis Wacana Kritis Fairclough

Dimensi AWK Fair-clough	Fokus Analisis	Proses yang Dilakukan dalam Analisis
1. Analisis Teks (Text Analysis)	Struktur linguistik, pilihan diksi, narasi kebijakan, dan tema dominan	Menyusun korpus 16 dokumen resmi hasil pertemuan AMMY dan AMMY+3 periode 1992–2024.
		Mentabulasi data dokumen (tahun pertemuan, jenis dokumen, agenda kebijakan, dan isi teks).
		Mengidentifikasi pola narasi dan representasi pemuda dalam dokumen kebijakan.
		Memilih kutipan teks yang merepresentasikan pola wacana dominan terkait pembangunan pemuda ASEAN.

Dimensi AWK Fair-clough	Fokus Analisis	Proses yang Dilakukan dalam Analisis
2. Analisis Praktik Diskursif (Discourse Practice)	Produksi, distribusi, dan normalisasi wacana kebijakan pemuda ASEAN	Mengkaji bagaimana dokumen kebijakan pemuda ASEAN diproduksi oleh aktor institusional dalam forum AMMY dan AMMY+3.
		Mengamati pola pengulangan dan konsistensi narasi kebijakan pemuda antar pertemuan.
		Menelaah intertekstualitas antar dokumen kebijakan untuk melihat kesinambungan wacana pembangunan pemuda.
		Mengkaji bagaimana wacana kebijakan tersebut didistribusikan dan dinormalisasi dalam kerangka kebijakan regional ASEAN.
3. Analisis Praktik Sosial–Budaya (Socio-cultural Practice)	Konteks sosial, politik, dan ideologis pembangunan regional	Menghubungkan representasi pemuda dalam kebijakan ASEAN dengan paradigma pembangunan regional dan global.
		Menafsirkan implikasi ideologis dari wacana pembangunan pemuda ASEAN terhadap konstruksi identitas dan peran pemuda.
		Menginterpretasikan bagaimana kebijakan pemuda ASEAN merefleksikan rezim wacana pembangunan global yang berpotensi memarginalisasi pemuda sebagai subjek pembangunan.
		Menggunakan paradigma <i>Encountering development</i> (Escobar, 1995) untuk menjelaskan relasi kekuasaan dan hegemoni dalam pembentukan kebijakan pemuda ASEAN. Paradigma Escobar membantu menjelaskan bagaimana wacana ini mereproduksi relasi kuasa dan praktik eksklusif dalam kebijakan pemuda ASEAN yang dipengaruhi oleh dominasi Barat. Dalam pandangan Escobar (1995: 9), “The West has a certain dominance over the Third World that has profound political, economic, and cultural effects” Dalam konteks ASEAN, pembangunan kepemudaan dapat dipahami sebagai bagian dari proyek hegemonik yang membentuk pemuda sebagai objek pembangunan

(Sumber: Penulis)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wacana pembangunan ASEAN masih sangat dipengaruhi oleh hegemoni Barat, mencerminkan paradigma yang dibentuk oleh

lembaga-lembaga global alih-alih kebutuhan khas Asia Tenggara. Meskipun ASEAN berupaya menentang hegemoni tersebut dengan menonjolkan identitas regional melalui berbagai inisiatif yang berfokus pada pemuda, kebijakan yang dihasilkan justru tanpa sadar mereproduksi logika pembangunan Barat. Sejalan dengan pemikiran yang dikemukakan oleh Arturo Escobar 1995, kerangka semacam ini lebih mengutamakan modernitas hegemonik dan mengabaikan pandangan lokal. Kebijakan pemuda ASEAN menekankan pemberdayaan, namun dalam praktiknya memosisikan kaum muda sebagai alat bagi integrasi ekonomi dan stabilitas kawasan, bukan sebagai agen perubahan yang aktif. Akibatnya, pemuda dipandang sebagai aset sosial dan ekonomi yang mendukung kepentingan elit, bukan sebagai pihak yang berperan dalam membentuk arah pembangunan. Ketiadaan isu-isu kritis seperti keadilan sosial dan kesenjangan menunjukkan bahwa agenda kepemudaan ASEAN lebih berfungsi sebagai kelanjutan dari ideologi pembangunan berpusat pada Barat, bukan sebagai proyek transformasi.

Hegemoni Barat dan Politik Generasi: Konsep Pembangunan ASEAN

Konsep pembangunan yang diadopsi dari negara-negara Barat telah mendominasi paradigma global. Sejalan dengan studi terdahulu oleh (Walker 1981; Wright 2012; Harper 2011; Lo 2011; Bittencourt dan Willetts 2018), dimana diamini oleh beberapa organisasi termasuk ASEAN. Akibatnya, kebijakan pembangunan di kawasan ini cenderung mereplikasi indikator dan narasi Barat tanpa mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi lokal. Namun, pendekatan tersebut gagal menangkap dimensi generasional, di mana kebutuhan dan nilai pemuda terus berubah. Sebagaimana dinyatakan (Woodman dan Wyn 2013c), *“Even when they reach middle age, today’s young people may not have the same middle-aged priorities,”* menunjukkan perlunya

paradigma pembangunan yang adaptif terhadap dinamika generasi.

ASEAN berupaya menolak hegemoni Barat dengan membangun identitas ASEAN di kalangan pemuda. Kutipan verbatim terhadap dokumen-dokumen ASEAN, seperti terlihat pada tabel di bawah, menunjukkan bahwa para menteri ASEAN dalam agenda kepemudaan membahas penguatan identitas regional.

Tabel 3. Interpretasi Wacana Pemberdayaan pemuda sebagai penguatan identitas ASEAN

Dokumen AMMY dan AMMY+3	Kutipan Verbatim	Interpretasi Wacana Pemberdayaan pemuda sebagai penguatan identitas ASEAN
ASEAN Ministerial Meeting on Youth I (1992)	<i>“promote ASEAN youth cooperation... enhance ASEAN awareness”</i> (Halaman 1)	Pemuda dikonstruksikan sebagai sarana integrasi regional melalui kerja sama lintas negara. Pemberdayaan dimaknai sebagai proses meningkatkan kesadaran kolektif terhadap identitas kawasan.
ASEAN Ministerial Meeting on Youth II (1997)	<i>“sharing of values, responsibilities and a common vision, and ASEAN fraternity among the young generation”</i> (Ayat 6, Poin 2)	Pemuda dikonstruksikan sebagai sarana integrasi regional melalui kerja sama lintas negara. Pemberdayaan dimaknai sebagai proses meningkatkan kesadaran kolektif terhadap identitas kawasan.
ASEAN Ministerial Meeting on Youth III (2000)	<i>“nurture a resilient and responsible ASEAN youth”</i> (Poin 11)	Pemberdayaan dipahami sebagai pembentukan karakter pemuda yang tangguh dan bertanggung jawab, selaras dengan kebutuhan pembangunan kawasan.
	<i>“Strengthening internal capacities to inculcate a sense of ASEAN awareness and identity among the ASEAN youth”</i> (Poin 12)	Wacana menekankan penguatan kapasitas internal sebagai mekanisme pembentukan identitas kolektif regional.

Hegemoni Barat dalam Kebijakan Pemuda ASEAN: Analisis Wacana Kritis atas Paradigma Generasional dalam AMMY (1992–2024) dan AMMY+3 (2007–2023)

Dokumen AMMY dan AMMY+3	Kutipan Verbatim	Interpretasi Wacana Pemberdayaan pemuda sebagai penguatan identitas ASEAN
ASEAN Ministerial Meeting on Youth VIII (2013)	<i>"boost ASEAN solidarity by offering voluntary community services"</i> (Poin 7)	Aktivitas sukarelawan direpresentasikan sebagai instrumen pembentukan solidaritas dan integrasi sosial regional.
	<i>"Promote greater awareness of ASEAN to youth, and engage them... in promoting social dialogues and people-to-people exchanges"</i> (Poin 8)	Pemberdayaan dimaknai sebagai keterlibatan pemuda dalam diplomasi sosial dan pertukaran budaya untuk memperkuat identitas regional.
ASEAN Ministerial Meeting on Youth X (2017)	<i>"play a more active role to promote greater inclusiveness and tolerance... develop an appreciation of diversity"</i> (Poin 7)	Pemuda direpresentasikan sebagai agen harmonisasi sosial yang bertugas menjaga keberagaman sebagai fondasi identitas ASEAN.
	<i>"engage, participate and provide... contributions in the policy-making processes"</i> (Poin 8)	Wacana menunjukkan pergeseran menuju partisipasi pemuda dalam proses kebijakan, namun tetap dalam kerangka institusional yang telah ditentukan.
ASEAN Ministerial Meeting on Youth XI (2019)	<i>"raising awareness on ASEAN among youths... create a we-feeling of ASEAN"</i> (Poin 9)	Identitas ASEAN dikonstruksi melalui pembentukan rasa kebersamaan emosional yang menekankan solidaritas regional.

Dokumen AMMY dan AMMY+3	Kutipan Verbatim	Interpretasi Wacana Pemberdayaan pemuda sebagai penguatan identitas ASEAN
ASEAN Ministerial Meeting on Youth XIII (2024)	<i>"promote the critical role of youth in socio-economic development and ASEAN Community Building"</i> (Poin 2)	Pemuda diposisikan sebagai sumber daya strategis pembangunan sosial-ekonomi dan integrasi komunitas ASEAN.
	<i>"intensify the multilateral and bilateral youth initiatives for enhancing mutual understanding"</i> (Poin 4)	Pemberdayaan pemuda dimaknai sebagai perluasan jejaring kerja sama regional untuk memperkuat identitas kolektif.
	<i>"greater awareness of ASEAN common identity and shared values... sense of belonging and togetherness... appreciation of diversity among ASEAN youth"</i> (Poin 5)	Wacana menegaskan pembentukan identitas ASEAN melalui nilai bersama, rasa memiliki, dan penghargaan terhadap keberagaman.
	<i>"Empowering and inspiring young people through volunteering activities... raising greater awareness of ASEAN Community"</i> (Poin 10)	Sukarelawan diposisikan sebagai mekanisme ideologis untuk menanamkan identitas komunitas regional.
ASEAN Ministerial Meeting on Youth +3 I (2007)	<i>"Forging youth co-operation... ASEAN awareness; civic responsibilities/leadership development; and youth employability"</i> (Poin 4)	Pemberdayaan pemuda menggaungkan integrasi identitas regional dengan pembentukan kapasitas kepemimpinan dan produktivitas ekonomi.
ASEAN Ministerial Meeting on Youth +3 IV (2013)	<i>"engagement with youth at all levels in building ASEAN today, and empower them being our tomorrow's leaders"</i> (Poin 8)	Pemuda direpresentasikan sebagai pemimpin masa depan ASEAN, sehingga pemberdayaan diposisikan sebagai investasi jangka panjang pembangunan kawasan

(Sumber: Penulis)

Tabel di atas menunjukkan bahwa wacana pemberdayaan pemuda dalam dokumen kebijakan yang dihasilkan oleh ASEAN secara konsisten menempatkan pemuda sebagai instrumen strategis dalam membangun identitas regional. Tetapi di

sisi lain, ASEAN juga mengadopsi sejumlah kerangka kerja internasional yang membahas isu-isu global seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, integrasi ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. Tabel di bawah ini menunjukkan agenda-agenda ASEAN yang secara langsung maupun tidak langsung mengadopsi lembaga internasional,

Tabel 4. Agenda ASEAN dalam Mengadopsi Lembaga Internasional

Agenda ASEAN dalam Mengadopsi Lembaga Internasional	Sitasi dalam Dokumen ASEAN	Rujukan terhadap Lembaga Internasional yang Mempengaruhi ASEAN
ASEAN Charter (2008)	<i>"Adherence to the principles of the United Nations Charter"</i> (ASEANb 1996)	United Nations Charter (1945)
ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) (2009)	<i>"ASEAN Member countries participated at the UN World Conference on Human Rights...ASEAN for the first time set itself towards the development of regional human rights regime."</i> (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights n.d.)	Universal Declaration of Human Rights (1946)
ASEAN Economic Community (AEC) (2015)	<i>"Member States shall make exceptions to their foreign exchange restrictions relating to payments for the products under the CEPT Scheme, as well as repatriation of such payments without prejudice to their rights under Article XVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)"</i> (ASEANb 1992)	World Trade Organization (1995)
ASEAN Working Group on Climate Change (AWGCC) (2009)	<i>"Strengthen global partnerships and support the implementation of relevant international agreements and frameworks, e.g. the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)."</i> (ASEAN 2015)	United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) (1992)

Agenda ASEAN dalam Mengadopsi Lembaga Internasional	Sitasi dalam Dokumen ASEAN	Rujukan terhadap Lembaga Internasional yang Mempengaruhi ASEAN
ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue (ACSDSD) (2019)	<i>"ASEAN Member States and external partners to promote complementarities between the ASEAN Community Vision 2025 and the UN 2030 Agenda for Sustainable Development"</i> (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue n.d.)	Sustainable Development Goals (SDGs) (2015)
ASEAN Work Plan on Youth 2021-2025	<i>"Promotion of youth's role in sports for development and peace (SDP) at the community level by supporting the implementation of UNESCO Sports and SDGs Youth Funshop"</i> (ASEAN 2022)	Sustainable Development Goals (SDGs) (2015)

(Sumber; Penulis)

Tabel 5. Agenda ASEAN dalam Mengadopsi Lembaga Internasional secara Tidak Langsung

Agenda ASEAN untuk Mengadopsi Lembaga Internasional	Referensi Lembaga Internasional yang Mempengaruhi ASEAN
ASEAN Regional Forum - ARF (1994)	United Nations Security Council (1946)
Initiative for ASEAN Integration - IAI (2000)	United Nations Development Programme (1965)
ASEAN Disaster Management and Emergency Response - AADMER (2005)	United Nations Office for Disaster Risk Reduction (1999)
ASEAN Health Ministers' Meetings (1980)	World Health Organization (1948)
ASEAN Climate Change Initiative - ACCI (2010)	Kyoto Protocol (1997), Paris Agreement (2015)
ASEAN Declaration on the Adoption of the 2030 Agenda for Sustainable Development (2017)	Sustainable Development Goals (2015)

(Sumber: Penulis)

Dua tabel di atas menunjukkan bahwa ASEAN sebagai lembaga regional tidak sepenuhnya terlepas dari pengaruh organisasi internasional global. Hal ini terlihat dari ASEAN mengadopsi dan menempatkan berbagai isu global yang banyak dipromosikan

oleh institusi Barat sebagai bagian dari agenda kebijakan kawasan.

Studi ini berargumen bahwa ASEAN berupaya melawan hegemoni Barat melalui kebijakan kepemudaan, di mana pemuda diposisikan sebagai instrumen pembangunan identitas regional, selaras dengan temuan (Malherbe dkk. 2016) bahwa pemuda dapat melawan hegemoni barat melalui melalui ekspresi visualnya. Sejak awal pembentukan agenda kepemudaan, narasi kebijakan dalam ASEAN secara konsisten menekankan pentingnya penguatan kesadaran kawasan, solidaritas regional, pembentukan nilai-nilai bersama, serta penumbuhan rasa memiliki terhadap komunitas regional. Keseluruhan elemen tersebut diarahkan untuk memperkuat pembangunan identitas regional ASEAN dalam melawan hegemoni Barat, selaras dengan argumen (Stubbs 2008). Pola serupa ditemukan dalam beberapa studi terdahulu dalam melawan hegemoni Barat melalui beberapa aspek (Coleman dan Serpell 2008) mengkritik dominasi kelas menengah kulit putih Eropa-Amerika yang dijadikan standar intelektual dan kritik terhadap dominasi kapitalisme dalam arus globalisasi (Nordtveit 2010). Kemudian dipertegas oleh temuan (Komlosy 2016) menyoroti kemunduran hegemoni negara barat yaitu Amerika Serikat karena adanya kekuatan global di negara Selatan, yaitu Tiongkok, yang kemudian diamini oleh (Wojczewski 2018) dimana adanya pergeseran hegemoni barat dalam perebutan makna dan identitas dalam tatanan dunia. Lebih jauh temuan (Buier 2022) transformasi sistem transportasi di Spanyol sebagai bentuk dominasi tanpa hegemoni.

Berdasarkan temuan di atas, pada saat yang sama meskipun pemuda dikonstruksikan sebagai objek pembangunan identitas regional, ASEAN sebagai lembaga regional tetap berada dalam bayang-bayang hegemoni organisasi internasional global. Escobar menyebutnya sebagai “Western Modernity” (Escobar 1995: 11), dimana negara-negara Barat mendominasi

wacana pembangunan dan menyingkirkan negara-negara non-Barat. Lebih lanjut Escobar menegaskan bahwa “*Development has relied exclusively on one knowledge system, namely, the modern Western one*” (Escobar 1995: 13). Dalam konteks ini, ASEAN juga mengadopsi sejumlah kebijakan dari lembaga internasional Barat, baik dalam bentuk regulasi maupun penguatan struktur kelembagaan, sebagai upaya merespons tantangan global walaupun kebijakan yang diadopsinya tidak selaras dengan isu-isu yang ada di Asia tenggara.

ASEAN mengadopsi tujuan dari lembaga-lembaga internasional membuat ruang geraknya pun menjadi terbatas pada lingkup regional. Oleh karena itu kebijakan yang muncul lebih diarahkan untuk menyesuaikan dengan standar global daripada menjawab kebutuhan dan realitas kawasan. Fenomena ini sejalan dengan berbagai studi terdahulu yang mengamini bahwa hegemoni Barat mendominasi dunia global (Walker 1981; Wright 2012). Hegemoni tersebut dibangun melalui retorika, lembaga swadaya masyarakat, serta wacana perubahan yang diperkuat oleh bahasa, sistem peringkat, dan diskursus neoliberalisme dalam pendidikan Barat (Harper 2011; Lo 2011; Bittencourt dan Willetts, 2018).

Sebagai kesimpulan, dalam sub bab ini menunjukkan bahwa ASEAN sebagai organisasi regional berupaya melawan hegemoni Barat, dalam hal ini pemuda digunakan sebagai objek pembangunan identitas ASEAN. Namun, karena kuatnya hegemoni Barat (Western modernity), ASEAN tidak cukup kuat dan tetap terseret dalam arus wacana pembangunan yang didefinisikan oleh dunia Barat. Oleh karena itu, subbab ini membuka ruang terhadap kebijakan ASEAN secara diskursif dalam membentuk dan mereproduksi posisi pemuda sebagai objek pembangunan yang tidak terlepas dari pengaruh hegemoni pembangunan Barat.

Kebijakan ASEAN: Bagaimana Pemuda Menjadi Objek Pembangunan

Berdasarkan temuan (Walker 1981; Wright 2012; Harper 2011; Lo 2011; Bittencourt dan Willetts 2018), hegemoni Barat mendominasi konsep pembangunan di tingkat internasional, dan ASEAN menjadi salah satu organisasi yang berada dalam lingkup hegemoni tersebut. Negara-negara Barat telah lama menguasai wacana dan arah pembangunan global. Sejak berdirinya pada 8 Agustus 1967, konsep pembangunan ASEAN terus berkembang, namun tetap bersifat abstrak dan bergantung pada kerja sama di kawasan Asia Tenggara. Dalam konteks pembangunan, pemuda kerap ditempatkan sebagai aset strategis dalam agenda pembangunan regional, sebagaimana terlihat dalam berbagai dokumen yang dihasilkan oleh agenda kementerian ASEAN mengenai kepemudaan.

Pemuda ASEAN diperlakukan bukan sebagai subjek yang membentuk arah pembangunan, melainkan sebagai penerima agenda yang ditentukan oleh elit yang diposisikan dalam “proyek pembangunan”, dimana diharapkan mampu mewujudkan dan memperkuat cita-cita regional ASEAN. Hal ini tampak jelas dalam kebijakan yang tertuang dalam berbagai dokumen ASEAN, seperti agenda menteri mengenai kepemudaan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 6. Interpretasi Wacana Pemuda Sebagai Objek Pembangunan

Dokumen AMMY dan AMMY +3	Kutipan Verbatim	Interpretasi Wacana Pemuda Sebagai Objek Pembangunan ASEAN
<i>ASEAN Ministerial Meeting on Youth I</i> (1992)	“to establish a firm foundation for common action to promote ASEAN youth cooperation in the spirit to enhance ASEAN awareness” (Halaman 1)	Pemuda diposisikan sebagai target penguatan kesadaran dan kerja sama regional.

Dokumen AMMY dan AMMY +3	Kutipan Verbatim	Interpretasi Wacana Pemuda Sebagai Objek Pembangunan ASEAN
<i>ASEAN Ministerial Meeting on Youth II</i> (1997)	“To inculcate the sharing of values, responsibilities and a common vision, and ASEAN fraternity among the young generation” (Ayat 6, Poin 2)	Pemuda dijadikan sasaran penanaman nilai dan visi kawasan.
<i>ASEAN Ministerial Meeting on Youth III</i> (2000)	“Commitment and determination to nurture a resilient and responsible ASEAN youth” (Poin 11)	Pemuda dikonstruksikan sebagai kelompok yang harus dibentuk melalui kebijakan pembangunan.
	“Strengthening internal capacities to inculcate a sense of ASEAN awareness and identity among the ASEAN youth” (Poin 12)	Pemuda dipandang sebagai objek peningkatan kapasitas untuk memperkuat identitas regional.
<i>ASEAN Ministerial Meeting on Youth VIII</i> (2013)	“boost ASEAN solidarity by offering voluntary community services” (Poin 7)	Pemuda dimobilisasi sebagai tenaga sosial untuk mendukung solidaritas kawasan.
	“promote greater awareness of ASEAN to youth, and engage them through different platforms in promoting social dialogues and people-to-people exchanges” (Poin 8)	Partisipasi pemuda diarahkan melalui program yang dirancang institusi regional.
<i>ASEAN Ministerial Meeting on Youth X</i> (2017)	“play a more active role to promote greater inclusiveness and tolerance as well as to develop an appreciation of diversity in our region” (Poin 7)	Pemuda dijadikan agen penyebaran nilai sosial dan politik kawasan.
	“engage, participate and provide suitable contributions in the policy-making processes in the region” (Poin 8)	Keterlibatan pemuda dibatasi pada kontribusi yang sesuai dengan agenda kebijakan yang sudah ditentukan.
<i>ASEAN Ministerial Meeting on Youth XI</i> (2019)	“raising awareness on ASEAN among youths in order to create a we-feeling of ASEAN” (Poin 9)	Pemuda menjadi sasaran pembentukan identitas kolektif regional.

Dokumen AMMY dan AMMY +3	Kutipan Verbatim	Interpretasi Wacana Pemuda Sebagai Objek Pembangunan ASEAN
ASEAN Ministerial Meeting on Youth XIII (2024)	<i>“promote the critical role of youth in socio-economic development and ASEAN Community Building in the ASEAN”</i> (Poin 2)	Pemuda diposisikan sebagai sumber daya pembangunan sosial-ekonomi kawasan.
	<i>“intensify the multi-lateral and bilateral youth initiatives for enhancing mutual understanding”</i> (Poin 4)	Kerja sama pemuda diarahkan untuk mendukung stabilitas dan integrasi regional.
	<i>“deepening greater awareness of ASEAN common identity and shared values, reinforcing a sense of belonging and togetherness, and cultivating an appreciation of diversity among ASEAN youth”</i> (Poin 5)	Pemuda dijadikan objek pembentukan identitas dan nilai bersama kawasan.
	<i>“Empowering and inspiring young people through volunteering activities and raising greater awareness of ASEAN Community among ASEAN young population”</i> (Poin 10)	Retorika pemberdayaan digunakan untuk mendorong keterlibatan pemuda dalam agenda pembangunan kawasan.
ASEAN Ministerial Meeting on Youth +3 I (2007)	<i>“Forging youth cooperation among ASEAN Member Countries in the priority areas of i) ASEAN awareness; ii) civic responsibilities/leadership development; and iii) promoting youth employability”</i> (Poin 4)	Pemuda dikonstruksikan sebagai sumber daya manusia untuk mendukung daya saing ekonomi dan sosial kawasan.
ASEAN Ministerial Meeting on Youth +3 IV (2013)	<i>“continue engagement with youth at all levels in building ASEAN today, and empower them being our tomorrow’s leaders”</i> (Poin 8)	Pemuda diposisikan sebagai aset pembangunan jangka panjang kawasan.

(Sumber: Penulis)

Berdasarkan analisis tabel di atas, memperlihatkan bahwa dalam berbagai dokumen kebijakan ASEAN, pemuda

secara dominan direpresentasikan sebagai objek pembangunan yang diarahkan untuk menginternalisasi nilai sosial, politik, identitas, serta agenda integrasi kawasan, sehingga peran mereka lebih ditempatkan sebagai instrumen pendukung proyek pembangunan regional.

Studi ini berfokus pada konsep pembangunan yang diterapkan ASEAN melalui kerja sama, sebagaimana selaras dengan Deklarasi Kuala Lumpur tahun 1971 tentang Kawasan Damai, Bebas, dan Netral (ZOPFAN), yang secara tegas menyatakan,

“need to meet present challenges and new developments by cooperating with all peace and freedom loving nations, both within and outside the region, in the furtherance of world peace, stability, and harmony”

(ZOPFAN 1971: 1).

Secara lebih konkret, gagasan ini mulai dilembagakan dalam ASEAN Vision 2020, dalam dokumen yang menyatakan,

“We resolve to chart a new direction towards the year 2020 called, ASEAN 2020: Partnership in Dynamic Development, which will forge closer economic integration within ASEAN”

(ASEAN 2012).

Gagasan tersebut ditegaskan kembali dalam ASEAN Community Vision 2025, yang menekankan *“the complementarity of the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development with ASEAN community building efforts to raise our peoples’ living standards”* (ASEAN 2015). Dari sinilah lahir tiga pilar utama komunitas, yaitu Komunitas Politik dan Keamanan, Komunitas Ekonomi, serta Komunitas Sosial Budaya. Berdasarkan garis sejarah tersebut, konsep pembangunan ASEAN telah ada sejak tahun 1971, yakni sejak berdirinya organisasi ini. Meskipun misi awalnya tidak secara langsung menyinggung pembangunan, ASEAN menegaskan pentingnya kerja sama regional sebagai sarana pembangunan bagi negara-negara berkembang di Asia Tenggara.

Sejak penyelenggaraan AMMY dan AMMY +3, wacana yang berkembang cenderung menempatkan pemuda sebagai pihak yang menjadi sasaran berbagai program pembangunan. Berdasarkan temuan di atas, terlihat bahwa pemuda dimobilisasi dalam berbagai aspek pembangunan, termasuk dalam pelibatan kerja sama regional dan internasional (Malherbe dkk. 2016), yang sebagian besar dipengaruhi oleh agenda dan isu-isu yang berkembang di negara-negara Barat (Bersaglio dkk. 2015). Dalam konteks ini, kebijakan ASEAN secara konsisten menempatkan pemuda sebagai target pembangunan (Ballard dkk. 2023; Wang dkk. 2023; Boat dkk. 2024), dalam konteks yang lebih luas, dalam ranah pendidikan global sering memandang kaum muda sebagai modal manusia yang harus selaras dengan standar internasional (Ashcraft 2000; Roth dan Brooks 2003; 2016). Namun pendekatan ini kerap dikritik karena mengabaikan konteks nilai-nilai lokal (Coleman dan Serpell, 2008; Ungar dkk 2008). Dengan demikian, studi ini menunjukkan bahwa pemuda tidak sekadar diposisikan sebagai aktor pembangunan, melainkan juga sebagai objek yang dikonstruksi melalui relasi kuasa, kepentingan global, dan dinamika identitas kawasan.

Studi ini memperkaya literatur dengan menegaskan bahwa konstruksi pemuda dalam kebijakan regional ASEAN tidak terlepas dari kuatnya hegemoni Barat yang memengaruhi arah, standar, serta orientasi pembangunan kepemudaan. Dalam kerangka tersebut, penelitian ini berargumen bahwa kebijakan ASEAN terhadap pemuda cenderung bersifat instrumental, karena pemuda kerap dijadikan fokus pembangunan, sementara persoalan struktural yang secara langsung dihadapi oleh kaum muda sering kali kurang memperoleh perhatian. Kondisi ini menunjukkan adanya praktik kuasa yang beroperasi melalui kebijakan pembangunan, yang secara tidak langsung berfungsi untuk mengontrol, membisukan, dan

menundukkan kaum muda (Sutopo 2022a). Logika yang bersifat instrumental ini tampak jelas dalam konteks ASEAN, di mana pemuda digambarkan sebagai aset produktif dalam pembangunan. Orientasi tersebut tercermin dalam arah kebijakan yang memposisikan partisipasi pemuda untuk melayani kepentingan ekonomi (Samad 2020; Wound 2020), sosial, dan politik kawasan melalui program-program terbatas seperti kewirausahaan, kepemimpinan, dan pelatihan kerja (Sutopo 2022b), sekaligus memperkuat simbol identitas kawasan. Dengan demikian, wacana pembangunan ASEAN menempatkan pemuda sebagai sasaran utama dalam proyek kemajuan pembangunan kawasan. Studi ini menginterpretasikan fenomena tersebut sebagai bagian dari paradigma pembangunan yang dikemukakan (Escobar 1995: 6) yang disebut sebagai “under-developing”, dimana masyarakat diharapkan untuk menyesuaikan diri melalui tindakan yang terarah, tepat, dan menyeluruh. Dalam konteks ASEAN, temuan di atas menunjukkan bahwa para menteri ASEAN menempatkan kaum muda untuk mengikuti berbagai intervensi yang telah ditetapkan. Intervensi yang dimaksud merujuk pada kebijakan-kebijakan dalam agenda kepemudaan ASEAN yang menempatkan pemuda sebagai pusat pembangunan kawasan, yang pada saat yang sama menunjukkan keterkaitan dengan paradigma pembangunan yang berakar dari konsep pembangunan Barat.

Sebagai kesimpulan dalam subbab ini, terlihat bahwa kebijakan ASEAN terhadap pemuda cenderung bersifat instrumental, dimana berbagai kebijakan yang dirumuskan masih menempatkan pemuda sebagai objek pembangunan kawasan. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemuda lebih sering diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan yang telah ditentukan oleh para pembuat kebijakan, dibandingkan diberikan ruang yang lebih luas untuk terlibat dalam menentukan arah pembangunan tersebut. Selain itu, kecenderungan ini juga memperlihatkan adanya

pengaruh kuat dari wacana pembangunan global yang membentuk cara pandang kebijakan kepemudaan di tingkat regional, sehingga pemuda diposisikan sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan, stabilitas, dan integrasi kawasan.

Eksklusi dan Bias Generasional: Isu Keadilan bagi Pemuda

ASEAN merupakan organisasi regional yang didominasi oleh negara-negara berkembang dan pada awalnya didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta generasi masa depan (ASEANc 1996). Namun, seiring berjalannya waktu, kepentingan ekonomi dan politik negara-negara anggotanya sering kali lebih diutamakan dibandingkan komitmen sosial yang menjadi dasar pendiriannya. Sebagaimana dijelaskan oleh (Woodman dan Wyn 2013d) *“youth policy may be based on the understandings of youth held by policy makers who themselves grew up as part of a different generation”*. Perspektif ini menyoroti bahwa kebijakan pemuda ASEAN juga merefleksikan pandangan generasional para pembuat kebijakan yang membentuk wacana pembangunan berdasarkan nilai dan pengalaman generasi sebelumnya, sehingga suara dan kebutuhan pemuda kontemporer sering kali tidak terakomodasi dalam proses perumusan kebijakan.

Dalam konteks pemuda, ketimpangan ini tampak semakin jelas melalui pertemuan tingkat menteri ASEAN yang merumuskan strategi pembangunan dengan menempatkan kaum muda sebagai alat kemajuan regional, bukan sebagai individu yang memiliki hak dan suara dalam pembangunan itu sendiri. Wacana ASEAN tentang keadilan bagi pemuda mencerminkan orientasi neoliberalisme yang mendasar. Sejalan dengan konsep Escobar tentang *“ongoing neoliberal adjustment process”* (Escobar 1995: 185) kebijakan ASEAN cenderung memposisikan pemuda sebagai

objek pembangunan, bukan sebagai subjek yang dihadapkan pada ketimpangan struktural. Pengakuan terhadap keadilan sosial masih terbatas, terlihat hanya dalam beberapa dokumen pertemuan yang menunjukkan bahwa inklusi pemuda lebih bersifat retorik daripada transformatif. Keterbatasan ruang wacana yang berorientasi pada keadilan dalam agenda kepemudaan ASEAN tampak dalam beberapa dokumen berikut ini.

Tabel 7. Eksklusi Isu: Masalah Keadilan Pemuda

Dokumen AMMY dan AMMY +3	Kutipan Verbatim	Interpretasi Wacana Eksklusi Isu: Masalah Keadilan Pemuda ASEAN
ASEAN Ministerial Meeting on Youth I (1992)	<i>“cherished ideals of peace, freedom, social justice and economic well-being are best attained by among others...”</i> (Halaman 2)	Keadilan sosial hanya disampaikan sebagai tujuan umum tanpa menyoroti kelompok pemuda rentan, sehingga berpotensi mengabaikan ketimpangan nyata.
ASEAN Ministerial Meeting on Youth IV (2003)	<i>“Ensure that all youth subsectors, particularly the out-of-school youth, youth with special needs, youth-at-risk, are given appropriate access to policy and program development both as beneficiaries and partners in sustainable employment.”</i> (Poin 2)	Kelompok rentan diakui, tetapi pemuda tetap diposisikan sebagai penerima program, bukan pengambil keputusan, sehingga eksklusi partisipasi masih terjadi.
ASEAN Ministerial Meeting on Youth +3 VIII (2023)	<i>“Engagement of youth in mutually beneficial programmes to support youth’s health and wellbeing, including mental health.”</i> (Poin 3)	Partisipasi pemuda dibatasi pada keterlibatan program yang sudah ditentukan, sehingga akses kelompok marjinal berpotensi tetap terbatas.
	<i>“Fostering mutual understanding, a sense of commonality and a stronger Community spirit among ASEAN Plus Three youth, enhancing their physical and mental well-being and promoting their skills development in the era of Fourth Industrial Revolution.”</i> (Poin 3)	Penekanan pada keseragaman kapasitas pemuda mengabaikan kesenjangan akses teknologi dan pendidikan, yang dapat memperkuat eksklusi.

(Sumber: Penulis)

Berdasarkan pada tabel di atas, para menteri ASEAN secara eksplisit membahas isu keadilan bagi pemuda hanya pada pertemuan tingkat menteri tahun 1992, 2003, dan 2023. Berbeda dengan sub bab sebelumnya, di mana pembahasan kebijakan erat kaitannya dengan pembangunan dan pembentukan identitas, isu keadilan bagi pemuda justru tampak terpinggirkan dan terfragmentasi (Woodman dan Wyn 2013e). Hal ini menunjukkan bahwa wacana tentang keadilan bagi pemuda bukan merupakan perhatian sistemik, melainkan terbatas pada inisiatif sektoral atau momen kebijakan tertentu. Dalam konteks ini, pendekatan ASEAN terhadap pemuda dapat dipahami sebagai bentuk “instrumentalisasi”, di mana pemuda diposisikan sebagai penerima manfaat, bukan sebagai rekan pembuat kebijakan.

Pola yang berulang ini sejalan dengan kritik Escobar bahwa wacana pembangunan di negara-negara Selatan masih memproduksi paradigma modernisasi yang berpusat pada Barat. Akibatnya, meskipun ASEAN secara retorik menonjolkan inklusivitas dan pemberdayaan, agenda kepemudaannya tetap berpijak pada logika pembangunan neoliberal yang lebih mengutamakan produktivitas dan stabilitas kawasan daripada keadilan dan kesetaraan. Menurut Escobar, model pembangunan global sering mengabaikan perbedaan budaya lokal dan memaksakan satu pola yang dianggap sebagai standar universal, sehingga masyarakat lokal diarahkan untuk mengikuti model pembangunan berdasarkan nilai-nilai Barat.

“A political economy of global economic and cultural production must thus explain both the new forms of capital accumulation and the local discourses and practices through which the global forms are necessarily deployed; it must explain, briefly put, “the production of cultural difference within a structured system of global political economy”

(Escobar 1995: 99).

Dalam konteks ASEAN, kebijakan

tentang pemuda sering kali disusun secara seragam, seolah-olah semua anak muda memiliki kebutuhan yang sama. Konsep ini berakar pada model kebijakan Barat. Padahal, pemuda di Asia Tenggara berasal dari latar belakang sosial dan ekonomi yang sangat beragam. Pendekatan semacam itu berisiko mengabaikan kesenjangan struktural yang mempengaruhi akses, kesempatan, dan cita-cita para pemuda. Seperti terlihat pada tabel berikut, kebijakan ASEAN belum sepenuhnya mencerminkan realitas yang dihadapi pemuda di kawasan Asia Tenggara.

Tabel 8. Kesenjangan Nasional dan Regional dalam Isu Kepemudaan: Narasi ASEAN dan Realitas Negara

Negara	Fokus Kebijakan Negara terhadap Isu Pemuda	Isu Empiris tentang Pemuda	Perbandingan dengan Isu di Tingkat ASEAN
Indonesia	Pemberdayaan pemuda di sektor ekonomi, program deradikalisasi, pelatihan vokasional, dan digitalisasi.	Reformasi 1998 menunjukkan peran penting pemuda dalam proses demokratisasi. Krisis ekonomi 1997 memicu meningkatnya pengangguran di kalangan muda. Setelah tahun 2000, muncul kecenderungan radikalisasi di sebagian kelompok pemuda. Sejak 2021 hingga 2024, ekonomi GIG berkembang pesat dan menjadi pilihan kerja bagi banyak anak muda.	Narasi ASEAN menonjolkan identitas dan kepemimpinan, namun mengabaikan kesenjangan ekonomi serta risiko radikalisasi nasional.
Malaysia	Akses pendidikan dan inklusi etnis, kewirausahaan pemuda, serta program peningkatan keterampilan kerja.	Ketimpangan etnis dalam pendidikan masih terlihat antara tahun 2003 hingga 2009. Tingkat pengangguran pemuda terus meningkat, sementara pekerjaan digital berkembang pesat sejak 2021.	Kebijakan ASEAN menyoroti pentingnya pendidikan, namun kurang memberi perhatian pada ketimpangan sosial ekonomi yang dihadapi pemuda di Malaysia.

Negara	Fokus Kebijakan Negara terhadap Isu Pemuda	Isu Empiris tentang Pemuda	Perbandingan dengan Isu di Tingkat ASEAN
Thailand	Program partisipasi politik, insentif ekonomi bagi wirausaha muda, dan peningkatan kesadaran kesehatan mental.	Aksi protes pemuda tahun 2020 menunjukkan tuntutan kuat terhadap reformasi politik. Partisipasi pemuda dalam pengambilan keputusan masih terbatas.	ASEAN lebih menekankan identitas regional daripada keterlibatan pemuda dalam aktivisme politik.
Filipina	Kebijakan ekspor tenaga kerja, program kewirausahaan muda, dan kampanye anti-narkoba.	Migrasi tenaga kerja muda meningkat sejak 2005 hingga 2024. Selain itu, muncul kekhawatiran tentang keselamatan pemuda serta risiko eksploitasi digital.	ASEAN menyoroti peningkatan keterampilan kerja, tetapi mengabaikan ketergantungan struktural migrasi tenaga kerja di Filipina.
Vietnam	Pelatihan STEM dan digital, keterlibatan pemuda dalam kebijakan ekonomi negara, serta inisiatif kohesi sosial.	Transformasi ekonomi yang cepat berdampak pada keamanan kerja bagi pemuda. Kekhawatiran terhadap keamanan siber dan keselamatan di ruang digital juga meningkat.	ASEAN mendorong literasi digital, tetapi belum memiliki strategi regional yang kuat untuk melindungi pemuda dari eksploitasi daring.
Myanmar	Keterwakilan pemuda dalam pemerintahan masih terbatas, dengan fokus pada kewirausahaan dan pendidikan digital.	Setelah kudeta militer tahun 2021, banyak pemuda meninggalkan negara dan sebagian terlibat dalam konflik bersenjata.	Narasi ASEAN tentang pembentukan identitas tidak mampu menjawab krisis unik yang dialami pemuda Myanmar, yakni keterasingan dan penindasan politik.
Singapura	Pelatihan kepemimpinan, kebijakan kesehatan mental, dan inisiatif keseimbangan kerja-hidup.	Tekanan biaya hidup yang tinggi menjadi beban bagi generasi muda. Banyak pemuda menghadapi ketidakpastian kerja dalam ekonomi gig dan mengalami krisis kesehatan mental.	Rencana kerja ASEAN menonjolkan kepemimpinan, tetapi kurang menanggapi kecemasan ekonomi pemuda perkotaan.

Negara	Fokus Kebijakan Negara terhadap Isu Pemuda	Isu Empiris tentang Pemuda	Perbandingan dengan Isu di Tingkat ASEAN
Laos	Program pembangunan pemuda pedesaan, penciptaan lapangan kerja, dan kebijakan migrasi.	Akses pendidikan masih terbatas. Kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan semakin melebar. Migrasi ke luar negeri meningkat dari tahun ke tahun.	ASEAN menyoroti peningkatan keterampilan kerja, tetapi belum memperhatikan dampak sosial dari migrasi pemuda.
Kamboja	Penindakan terhadap bisnis ilegal, program reintegrasi ekonomi bagi korban perdagangan manusia, serta pengawasan pemerintah terhadap industri digital.	Jaringan perdagangan manusia menargetkan pemuda, terutama dalam pusat penipuan digital. Banyak pemuda terjebak dalam sindikat perjudian daring dan kerja paksa, sementara perlindungan hukum masih lemah.	Fokus keamanan regional ASEAN belum menyentuh kerentanan pemuda terhadap perdagangan manusia dan eksploitasi kerja digital.
Brunei Darussalam	Penguatan identitas nasional pemuda dan kebijakan diversifikasi ekonomi yang berjalan lambat.	Ketergantungan ekonomi pada minyak masih tinggi. Peluang keterlibatan politik bagi pemuda sangat terbatas, dan inovasi kewirausahaan berjalan lambat.	ASEAN mendorong pembentukan identitas regional, namun belum menantang ketergantungan ekonomi pada industri tradisional.

(Sumber: Penulis)

Tabel di atas menunjukkan perbedaan antara kebijakan kepemudaan nasional dan pendekatan ASEAN terhadap isu-isu pemuda. Kebijakan ASEAN lebih berfokus pada pembangunan identitas regional, kepemimpinan pemuda, dan digitalisasi, namun kurang memberikan perhatian terhadap persoalan spesifik yang dihadapi masing-masing negara, seperti pengangguran, eksploitasi tenaga kerja, dan represi politik.

Kebijakan pemuda di negara-negara anggota ASEAN menunjukkan kecenderungan untuk menempatkan pemuda sebagai bagian

penting dalam pembangunan ekonomi, pendidikan, dan peningkatan daya saing global. Di Indonesia, kebijakan pemuda banyak diarahkan pada pemberdayaan ekonomi dan deradikalisasi sebagai respons terhadap tingginya angka pengangguran pemuda serta dinamika ideologi setelah reformasi. Pendekatan yang relatif serupa juga terlihat di Malaysia, yang menekankan pentingnya inklusi pendidikan dan penguatan kewirausahaan untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi antar kelompok etnis. Sementara itu, Filipina lebih memprioritaskan peningkatan keterampilan kerja global karena ketergantungan ekonomi negara tersebut pada migrasi tenaga kerja muda. Berbeda dengan itu, Vietnam menempatkan pengembangan keterampilan digital dan STEM sebagai strategi utama untuk menopang industrialisasi dan transformasi ekonomi nasional. Di sisi yang lain, Singapore lebih menekankan penguatan kepemimpinan, kesehatan mental, serta keterampilan teknologi untuk mempertahankan posisi sebagai negara dengan ekonomi maju. Sementara itu, Brunei Darussalam mengarahkan kebijakan pemudanya pada upaya diversifikasi ekonomi dan penguatan identitas nasional sebagai konsekuensi dari ketergantungan pada sektor minyak.

Selain berorientasi pada pembangunan ekonomi, kebijakan pemuda di beberapa negara juga mencerminkan upaya pemerintah dalam mengelola pemuda sebagai kelompok yang rentan terhadap dinamika stabilitas sosial dan politik. Di Thailand, misalnya, kebijakan pemuda diarahkan untuk mendorong partisipasi sosial dan kewirausahaan sebagai respons terhadap meningkatnya mobilisasi politik generasi muda. Kondisi yang lebih kompleks terlihat di Myanmar, dimana konflik politik membatasi ruang partisipasi pemuda dalam kehidupan publik. Selanjutnya, Laos memprioritaskan pembangunan pemuda pedesaan serta pengelolaan migrasi tenaga kerja karena terbatasnya peluang kerja di dalam

negeri. Adapun Cambodia menitikberatkan kebijakan pemuda pada perlindungan terhadap perdagangan manusia dan eksploitasi digital, mengingat tingginya kerentanan pemuda terhadap kejahatan transnasional.

Secara keseluruhan, variasi konteks domestik tersebut menunjukkan bahwa konstruksi kebijakan pemuda di kawasan ASEAN tidak seragam, melainkan sangat ditentukan oleh kebutuhan pembangunan nasional masing-masing negara. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ASEAN memiliki kerangka kepemudaan yang inklusif, pendekatan yang lebih kontekstual masih dibutuhkan untuk menjawab tantangan unik di setiap negara anggota. Dalam konteks ini, masalah kepemudaan di ASEAN tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan yang memperkuat identitas ASEAN (Stubbs 2008) atau tujuan pembangunan yang sejalan dengan (Ashcraft 2000; Roth dan Brooks 2003; 2016; Bersaglio dkk. 2015; Ballard dkk. 2023; Wang et al. 2023; Boat et al. 2024; Samad 2020; Malherbe et al. 2016). Penyelesaiannya juga memerlukan perubahan struktural dalam kebijakan ketenagakerjaan, partisipasi politik, dan perlindungan hak sipil di setiap negara (Ungar dkk. 2008; Coleman dan Serpell 2008). Jika pemuda terus diperlakukan sebagai objek pembangunan tanpa ruang yang memadai untuk berpartisipasi aktif, maka berbagai persoalan yang mereka hadapi akan terus berulang dalam lingkaran yang sama.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap dokumen *ASEAN Ministerial Meeting on Youth* (AMMY) dan *ASEAN Ministerial Meeting on Youth +3* (AMMY+3), studi ini menunjukkan bahwa kebijakan kepemudaan ASEAN secara diskursif membangun pemuda sebagai instrumen strategis dalam proyek pembangunan kawasan. Pemuda diposisikan sebagai sarana untuk memperkuat identitas regional sekaligus

mendukung agenda integrasi ekonomi, sosial, dan politik ASEAN. Meskipun ASEAN berupaya membangun identitas kawasan yang mandiri, kebijakan kepemudaan yang dirumuskan masih berlandaskan paradigma pembangunan Barat.

Melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis Fairclough, studi ini mengungkap bahwa representasi pemuda dalam dokumen kebijakan ASEAN tidak bersifat netral, melainkan dibentuk melalui relasi kuasa yang mereproduksi paradigma pembangunan global. Analisis terhadap dimensi teks, praktik diskursif, dan praktik sosial-budaya menunjukkan bahwa narasi pemberdayaan pemuda dalam kebijakan ASEAN lebih sering berfungsi sebagai mekanisme legitimasi pembangunan kawasan dibandingkan sebagai upaya memperluas ruang partisipasi substantif pemuda dalam proses pengambilan keputusan.

Temuan studi ini juga mengajukan konsep “instrumentalisasi pemuda”, yaitu kondisi ketika pemuda lebih sering ditempatkan sebagai target pembangunan daripada sebagai aktor yang menentukan arah pembangunan. Dalam konteks ini, berbagai persoalan mendasar seperti ketimpangan akses pendidikan, pekerjaan layak, serta partisipasi politik cenderung terpinggirkan. Sebaliknya, kebijakan kepemudaan lebih diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia dalam kerangka kepentingan ekonomi, politik, dan identitas regional. Ketimpangan tersebut semakin diperkuat oleh adanya jarak generasional antara pemuda kontemporer dan para pembuat kebijakan, yang memiliki pengalaman sosial serta orientasi nilai yang berbeda dalam memandang masa depan kawasan.

Dalam paradigma pembangunan Arturo Escobar, studi ini menunjukkan bahwa kebijakan kepemudaan ASEAN masih beroperasi dalam rezim wacana pembangunan yang berakar pada modernitas Barat. Paradigma tersebut menekankan

stabilitas dan produktivitas sebagai tujuan utama pembangunan, sehingga mengabaikan kompleksitas realitas sosial, budaya, dan struktural yang membentuk pengalaman hidup pemuda di Asia Tenggara.

Berdasarkan temuan tersebut, studi ini menekankan pentingnya pergeseran paradigma kebijakan kepemudaan ASEAN menuju pendekatan yang lebih partisipatif, kontekstual, dan berkeadilan sosial. Kebijakan kepemudaan di kawasan Asia Tenggara perlu membuka ruang yang lebih substantif bagi pemuda untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan, sekaligus mengakomodasi keragaman realitas nasional dan lokal. Tanpa perubahan paradigma tersebut, kebijakan kepemudaan ASEAN berisiko terus melanggengkan relasi kuasa pembangunan global yang menempatkan pemuda sebagai objek pembangunan, bukan sebagai subjek transformasi sosial kawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue. n.d. “About ACSDS.” Diakses pada 15 September 2025 (<https://www.acsdsd.org/about/>).
- ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights. n.d. . “About AICHR.” Diakses pada 15 September 2025 (<https://aichr.org/about-aichr-2/>).
- ASEAN Secretariat. 2023. “ASEAN Youth Development Index 2022: The 2nd Report.” Jakarta: ASEAN. Diakses pada 15 September 2025 (https://asean.org/wp-content/uploads/2023/06/4th-VERSION_22313_ASEAN-YDI-Report_Spreads-LQ_23Jun23.pdf).
- ASEAN. 2012. “ASEAN Vision 2020.” Jakarta: ASEAN. Diakses pada 26 September 2025 (<https://asean.org/asean-vision-2020/>).
- ASEAN. 2015. “ASEAN Community Vision 2025.

- Jakarta: ASEAN. Diakses pada 27 September 2025 (<https://www.asean.org/wp-content/uploads/images/2015/November/aec-page/ASEAN-Community-Vision-2025.pdf>).
- ASEAN. 2015. "ASEAN 2025: Forging Ahead Together. Jakarta: The ASEAN Secretariat." Diakses pada 22 September 2025 (<https://www.asean.org/wp-content/uploads/2015/12/ASEAN-2025-Forging-Ahead-Together-final.pdf>).
- ASEAN. 2022. "ASEAN Work Plan on Youth 2021–2025." Jakarta: The ASEAN Secretariat. Diakses pada 22 September 2025 (https://asean.org/wp-content/uploads/2022/11/ASEAN-Work-Plan-on-Youth-2021-2025_.pdf).
- ASEANa. 1992. "The Founding of ASEAN." Jakarta: ASEAN. Diakses pada 22 September 2025 dari (<https://asean.org/the-founding-of-asean/>).
- ASEANa. 1996. "The Founding of ASEAN." Jakarta: ASEAN. Diakses pada 15 September 2025 dari (<https://asean.org/the-founding-of-asean/>).
- ASEANb. 1992. "Major Sectoral Bodies & Committees." Jakarta: ASEAN. Diakses pada 18 September 2025 (<https://asean.org/our-communities/asean-socio-cultural-community/education-youth/major-sectoral-bodies-committees/>).
- ASEANb. 1996. "What We Do". Jakarta: ASEAN. Diakses pada 18 September 2025 (<https://asean.org/what-we-do/>).
- ASEANc. 1996. "Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area (AFTA)." Jakarta: ASEAN. Diakses pada 22 September 2025 (<https://asean.org/agreement-on-the-common-effective-preferential-tariff-cept-scheme-for-the-asean-free-trade-area-afta/>).
- Ashcraft, Robert F. 2000. "Where Youth Work Preparation Meets Higher Education: Perspectives from an American Humanities Campus Program." *Applied Developmental Science* 4(S1):38–46.
- Ballard, Parissa J., Gabrielle Anderson, Daniel P. Moore, dan Sarah S. Daniel. 2023. "Youth Experiences in Authoring Action: The Impact of an Arts-Based Youth Program on Youth Development." *Journal of Adolescent Research* 38(1):178–210.
- Bersaglio, Brock, Charis Enns, dan Thembela Kepe. 2015. "Youth Under Construction: The United Nations' Representations of Youth in the Global Conversation on the Post-2015 Development Agenda." *Canadian Journal of Development Studies/Revue canadienne d'études du développement* 36(1):57–71.
- Bittencourt, Thiago, dan Andrew Willetts. 2018. "Negotiating the Tensions: A Critical Study of International Schools' Mission Statements." *Globalisation, Societies and Education* 16(4):515–525.
- Boat, A. A., M. D. Seward, C. Y. Wu, dan P. C. Scales. 2024. "Validation of a Youth Social Capital Scale Informed by Positive Youth Development." *Applied Developmental Science*:1–14.
- Buier, N. 2022. "Spanish High-Speed Rail: Infrastructural Development and Dominance Without Hegemony." *Capitalism Nature Socialism* 33(4):56–74.
- Escobar, Arturo. 1995. *Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Fairclough, Norman. 2023. "Critical Discourse Analysis." Hal. 11–22 dalam *The Routledge Handbook of Discourse Analysis*. London: Routledge.
- Ganapathy-Coleman, Hema, dan Robert Serpell. 2008. "Challenging Western Hegemony Through Systematic Study of Cultural Diversity: An Undergraduate Course on Child Development and Culture." *Intercultural Education* 19(2):97–

104.

- Government of Malaysia. 1971. "ZOPFAN (Zone of Peace, Freedom and Neutrality)." Kuala Lumpur: Prime Minister's Office of Malaysia. Diakses pada 6 September 2025 (<https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2019/02/1971-Zone-of-Peace-Freedom-and-Neutrality-Declaration-1-1.pdf>).
- Harper, Sarah M. 2011. "Counting the Costs of a Global Anglophonic Hegemony: Examining the Impact of US Language Education Policy on Linguistic Minorities Worldwide." *Indiana Journal of Global Legal Studies* 18:515.
- International Organization for Migration. 2024. "IOM's Regional Situation Report on Trafficking in Persons into Forced Criminality in Online Scamming Centres in Southeast Asia." Diakses pada 6 September 2025 (<https://roasiapacific.iom.int/sites/g/files/tmzbd1671/files/documents/2024-02/iom-southeast-asia-trafficking-for-forced-criminality-update-december-2023.pdf>).
- Komlosy, Andrea. 2016. "Prospects of Decline and Hegemonic Shifts for the West." *Journal of World-Systems Research* 22(2):463–483.
- Lo, William Y. W. 2011. "Soft Power, University Rankings and Knowledge Production: Distinctions between Hegemony and Self-Determination in Higher Education." *Comparative Education* 47(2):209–222.
- Malherbe, Neil, Shanaaz Suffla, Mohamed Seedat, dan Umesh Bawa. 2016. "Visually Negotiating Hegemonic Discourse through Photovoice: Understanding Youth Representations of Safety." *Discourse & Society* 27(6):589–606.
- Roth, Jodie L., dan Jeanne Brooks-Gunn. 2003. "What Exactly Is a Youth Development Program? Answers from Research and Practice." *Applied Developmental Science* 7(2):94–111.
- Roth, Jodie L., dan Jeanne Brooks-Gunn. 2016. "Evaluating Youth Development Programs: Progress and Promise." *Applied Developmental Science* 20(3):188–202.
- Samad, Mohd R. B. 2020. "Perceptions of ASEAN Youth Towards Japan: Impact on the Japanese Economy." *IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies* 3(2):157–172.
- SEAMEO Secretariat. 2025. "Southeast Asia's Education Challenge: 11.8 Million Out of School Children and Youth." Bangkok: SEAMEO. Diakses pada September 2025 (<https://www.seameo.org/category/7/481>).
- Statista. 2025. "Total Population of the ASEAN Countries from 2019 to 2029." Diakses pada 3 September 2025 (<https://www.statista.com/statistics/796222/total-population-of-the-asean-countries/>).
- Stubbs, Richard. 2008. "The ASEAN Alternative? Ideas, Institutions and the Challenge to 'Global' Governance." *The Pacific Review* 21(4):451–468.
- Sutopo, Oki R. 2022a. "Perdebatan Perspektif Transisi dalam Kajian Kepemudaan." *Jurnal Studi Pemuda* 11(1):1–13.
- Ungar, Michael, Linda Liebenberg, Robert Boothroyd, W. M. Kwong, T. Y. Lee, J. Leblanc, dan A. Makhnach. 2008. "The Study of Youth Resilience Across Cultures: Lessons from a Pilot Study of Measurement Development." *Research in Human Development* 5(3):166–180.
- Walker, R. B. J. 1981. "World Politics and Western Reason: Universalism, Pluralism, Hegemony." *Alternatives* 7(2):195–227.
- Wang, Y., X. Li, K. C. Bronk, dan D. Lin. 2023. "Factors that Promote Positive Chinese Youth Development: A Qualitative Study." *Applied Developmental Science* 27(3):251–268.
- Wojczewski, T. 2018. "Global Power Shifts and World Order: The Contestation of 'Western' Discursive Hegemony." *Cambridge Review of International*

Affairs 31(1):33–52.

Woodman, Dan, dan Johanna Wyn. 2013. "Youth Policy and Generations: Why Youth Policy Needs to 'Rethink Youth'." *Social Policy and Society* 12(2):265–275.

Wright, Geoffrey W. 2012. "NGOs and Western Hegemony: Causes for Concern and Ideas for Change." *Development in Practice* 22(1):123–134.